

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TEBO**



**Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Kode Pos – 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp/Fax. (0744) 21658**

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah pelayanan di bidang kepegawaian kepada aparatur sipil.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026 mendatang.

Muara Tebo, - 11 - 2025

Plt. Kepala BKPSDM
Kabupaten Tebo



Suwarto, SE., MM

Pembina Tingkat I

Nip. 19680806 199803 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2027	43
BAB V. PENUTUP	56
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	56
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	56
5.3. Rencana Tindak lanjut	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan perencanaan menduduki peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025 - 2029. Renja 2026 ini merupakan operasionalisasi tahun kedua dari pelaksanaan Renstra BKPSDM 2025–2029.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 -2029.
 21. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 38);
 22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 50).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2027

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai Renstra OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo melaksanakan 3 program 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 1.3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - 1.4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.5.2. Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.5.3. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
 - 1.5.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.5.5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
 - 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 2.1.1. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - 2.1.2. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
 - 2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.2. Mutasi dan Promosi ASN
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
 - 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 2.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2.3.2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
 - 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.1. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 2.4.2. Pembinaan disiplin ASN
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berikut ini adalah capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dan program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2024

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indek Profesionalitas ASN	56,75	76,81	135,35
		Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	15,5	27,79	179,29
2	Meningkatnya Indek Sistem Merit		Indek Sistem Merit	0,49	0,52	106,12
		Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN	90,50	76,70	84,75
			Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	80	80,10	100,12

Dari tabel Target dan Realisasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2024 dapat dilihat bahwa indikator tujuan indek profesionalitas ASN sudah tercapai begitu juga untuk indikator indek sistem merit juga tercapai.

Berdasarkan tabel indikator sasaran Persentase peningkatan kompetensi ASN sudah tercapai dari target yang ditetapkan, walaupun demikian untuk kedepan perlu upaya mempertahankan dan meningkatkan persentase peningkatan kompetensi ASN tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Konsistensi dalam penganggaran diklat dan peningkatan SDM
- b) Memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap ASN untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan pengembangan kompetensi
- c) Menghimbau kepada ASN untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kompetensinya walaupun tanpa anggaran bisa dilakukan secara daring.
- d) Mengusulkan penambahan anggaran kegiatan pengembangan kompetensi.

Indikator Sasaran Persentase capaian kinerja ASN tahun 2024 belum tercapai, dengan capain 84,75 %. Upaya kedepan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja ASN antara lain:

- a) Pemantauan peningkatan disiplin ASN
- b) Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui e-Kinerja agar real-time dan akurat

Indikator Sasaran persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya tahun 2024 sudah tercapai sesuai target, dimana capaiannya adalah 100,12 %. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penegakan prinsip sistem merit secara konsisten dalam setiap tahapan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengisian jabatan, hingga pengembangan karier. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan peningkatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pemahaman internal perangkat daerah mengenai pentingnya sistem merit sebagai fondasi pengelolaan SDM aparatur yang profesional.

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Program

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	A	100
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97	97,41	100,42
		Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	9	10,53	117,00
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat structural	4,2	5,46	130,00

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2024 (APBD Perubahan) sebesar Rp.18.270.463.091,-. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.243.378.601,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.027.084.490,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 92.132.869,-.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2024 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan, namun demikian perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik kegiatan maupun program. Untuk itu perlu penguatan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat dilaksanakan adalah Peningkatan pelayanan profesional kepegawaian dan penggunaan pelayanan berbasis elektronik. Selain itu Penempatan

ASN sesuai kompetensi perlu menjadi perhatian. Melalui penggunaan pendataan pegawai berbasis elektronik juga dapat membantu dalam menentukan target kinerja sehingga dapat tercapai. Sebagian indikator yang tidak tercapai menjadi dasar penyusunan strategi 2026.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	A	100	A	A	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100	100.00	75
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	16	4	4	4	100	4	12.00	75
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100	100	100	100	100	100	100.00	75

5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	29	28	28	100	31	88.00	75.86
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	12	12	12	100	12	36.00	75.00
5.03.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase penyelesaian laporan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100.00	75.00
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	2	2	2	100	2	6.00	75
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100.00	75
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	6	3	3	100	3	12.00	60
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100	100	100	100	100	100	100.00	75
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12.00	75

5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44	11	11	11	100	10	32.00	72.73
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	20	5	5	5	100	5	15.00	75
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192	48	48	48	100	48	144.00	75
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12	36.00	75
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan rutin kantor	100	100	100	100	100	100	100.00	75
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	1	100	1	3.00	75
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36.00	75
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36.00	75

5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100.00	75
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	20	20	20	100	20	60.00	75
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184	46	46	46	100	46	138.00	75
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14.55	8.9	9	10.53	117	9	10.53	72.37
		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97	98.56	97	97,41	100.42	97	97.41	100.42
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase bezzeting pegawai	39	35.36	37	40,40	109,19	38	40.40	103.59
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	32	8	8	8	100	8	24.00	75
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	630	121	150	157	104,67	170	448.00	71.11

5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4	1	1	1	100	1	3.00	75
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16	4	4	4	100	4	12.00	75
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi	97	93,1	97	79,41	81,86	97	97.00	100.00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	1	1	1	100	1	3.00	75.00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500	753	600	282	47	650	1685.00	67.40
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	10	2	2	2	100	2	6.00	60.00
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	50	50	50	100	50	150.00	75.00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120	38	30	31	103	30	99.00	82.50
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	0.3	0.32	0.4	0.3	133,33	0.40	0.34	113.33

5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	38	50	35	70	50	123.00	49.20
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36	11	9	12	133,33	9	32.00	88.89
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	8.68	4.62	4.2	5,46	130	5.00	5.00	57.60
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4	1	1	1	100	1	3.00	75
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	4	1	1	1	100	1	3.00	75

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo melaksanakan Urusan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasar pada indikator yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara umum, kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan capaian indikator kinerja utama yang mendekati atau melebihi target. Beberapa indikator strategis seperti **peningkatan kompetensi ASN** dan **penempatan jabatan sesuai kompetensi** telah melampaui target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas program pelayanan.

Namun, masih terdapat indikator seperti **capaian kinerja ASN** yang belum mencapai target. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara input (pengembangan kompetensi, sistem merit) dan output (performa kerja individu ASN). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo
(Renstra 2023-2026)

NO	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<u>Indikator Kinerja Kunci</u>											
	- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			256,5 %	257 %	257,5 %		74,55 %		257,5 %		
	- Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)			8,6 %	8,7 %	88 %		23,57 %		88 %		
	- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			88,2 %	88,4 %	88,6 %		33,93 %		88,6 %		
2	<u>Indikator Kinerja Program</u>											
	- Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir			14,38	14,86	14,55		10,53		9		
	- Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			97	97	97		97,41		97		
	- Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural			13,61	10,32	8,67		5,46		5,88		

3	Indikator Kinerja Utama											
	- Persentase peningkatan kompetensi ASN			15,5	16	16,5		27,79		16,5		
	- Persentase Capaian Kinerja ASN			90,5	90,75	91		76,70		91		
	- Persentase Jabatan yang sesuai dengan kompetensinya			80	80,5	81		80,10		81		

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk indikator kinerja kunci pada tahun 2024 untuk semua indikator realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena pada tahun 2022 (setelah penyusunan renstra) terjadi perubahan rumus ketika evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Untuk indikator kinerja program hanya satu terealisasi dengan baik, dan dua program tidak sesuai dengan target renstra karena terjadinya perubahan jumlah pejabat struktural untuk indikator Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir sehingga target tidak bisa lagi tercapai, sedangkan indikator program Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural juga tidak tercapai karena adanya pengurangan anggaran. Untuk semua indikator Kinerja Utama tercapai dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Sebelum menentukan isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terlebih dulu kita ketahui permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Layanan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi
2. Penerapan sistem merit yang belum terlaksana sebagaimana mestinya
3. ASN belum memiliki kompetensi sesuai standar jabatan
4. Kurangnya motivasi ASN untuk berkinerja tinggi
5. Pelatihan/kegiatan pengembangan belum sesuai kebutuhan
6. Banyak ASN tidak mendapatkan kesempatan pelatihan secara merata

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Digitalisasi Kepegawaian

Digitalisasi manajemen ASN merupakan mandat dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan adaptif. Di Kabupaten Tebo, sebagian besar layanan administrasi kepegawaian masih dilakukan secara manual. Hal ini berdampak pada lambatnya proses layanan dan rendahnya akuntabilitas data kepegawaian.

2. Optimalisasi Sistem Merit

Implementasi sistem merit belum berjalan optimal, terlihat dari belum maksimalnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi, serta masih lemahnya pengembangan karier yang adil dan objektif. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan menurunkan profesionalisme ASN dan memperburuk kualitas tata kelola kepegawaian.

3. Peningkatan profesionalitas ASN

Profesionalisme ASN belum tercapai secara menyeluruh, antara lain karena belum tersedianya data kompetensi yang memadai, lemahnya sistem penghargaan berbasis kinerja, serta budaya kerja yang belum mendukung inovasi. Hal ini berdampak pada rendahnya kinerja perangkat daerah dan kualitas layanan publik.

4. Penguatan pengembangan kompetensi ASN

Program pelatihan ASN belum didasarkan pada analisis kebutuhan jabatan secara sistematis. Akibatnya, pelatihan sering tidak tepat sasaran dan tidak merata, sehingga tidak efektif meningkatkan kapasitas ASN.

Untuk mendukung dan menjawab isu-isu strategis di atas, BKPSDM Kabupaten Tebo juga perlu mencermati berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi:

1. Tantangan

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel (good & clean governance);
- 2) Kinerja ASN yang belum optimal dan belum didukung sistem evaluasi kinerja yang kuat;
- 3) Masih lemahnya pembinaan disiplin dan budaya kerja ASN;
- 4) Belum maksimalnya penerapan manajemen pelayanan ASN yang berbasis sistem;
- 5) Penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai kompetensi dan kebutuhan jabatan;
- 6) Pelaksanaan seleksi jabatan yang masih menghadapi tantangan profesionalisme dan objektivitas.

2. Peluang

- 1) Arah kebijakan nasional mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem merit;
- 2) Kemajuan teknologi informasi mendukung implementasi e-government dan integrasi sistem kepegawaian;
- 3) Tersedianya regulasi dan kebijakan pendukung pengembangan ASN (UU ASN, Permenpan, dll);
- 4) Terbukanya peluang kerja sama antar-instansi dalam pengembangan kompetensi ASN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2026 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2026;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026;

5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2026 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2026. Untuk lebih jelasnya rewiu terhadap rancangan awal RKPD 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
BKPSDM Kabupaten Tebo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	83.77	4.815.845.971,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	83.77	3.537.028.286,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	14.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	14.000.000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.998.203.071.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.902.193.186.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	3.862.099.071,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	2.766.089.186,00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	136.104.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	136.104.000,00	
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				22.800.000,00	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				22.800.000,00	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	22.800.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	22.800.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				53.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				35.500.000,00	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	53.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	35.500.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.988.900,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.345.400,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.996.900,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.996.900,00	
Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	59.997.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tebo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	62.997.000,00	

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kab Tebo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	5 paket	50.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kab Tebo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	5 paket	29.356.500,00	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	24.995.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	24.995.000,00	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	75.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				209.814.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				229.258.000,00	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100.000.500,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120.168.000,00	
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	109.813.500,00	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	109.090.800,00	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				212.040.000,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				133.930.900,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Tebo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	180.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Tebo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	101.890.900,00	

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab Tebo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	32.040.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab Tebo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	32.040.000,00	
Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	2,07%	1.460.143.226,00	Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	2,07%	871.334.033,00	
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	83%				Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	83%		
		Persentase pengembangan karie ASN sesuai dengan kompetensinya	90.10%				Persentase pengembangan karie ASN sesuai dengan kompetensinya	90.10%		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				639.980.100,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				391.504.100	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	300.000.000,00	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 laporan	87.000.000,00	
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 dokumen	50.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 dokumen	30.000.000,00	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab Tebo	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	40.000.000,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab Tebo	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	23.824.000,00	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	249.980.100,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	249.980.100,00	
Mutasi dan Promosi ASN				464.019.900,00	Mutasi dan Promosi ASN				253.486.133,00	

Pengelolaan Mutasi ASN	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	74.128.800,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab Tebo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	20.098.600,00	
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab Tebo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	99.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab Tebo	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	23.000.000	
Pengelolaan promosi ASN	Kab Tebo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	290.891.100,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab Tebo	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	210.387.533,00	
Pengembangan Kompetensi ASN				226.143.226,00	Pengembangan Kompetensi ASN				143.601.600,00	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	196.143.226,00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 orang	126.523.200,00	
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 orang	30.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 orang	17.078,400,00	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab Tebo			130.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab Tebo			82.742.200,00	
Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab Tebo	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	40.000.000,00	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab Tebo	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	20.000.000,00	
Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	35 orang	50.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	35 orang	15.342.200,00	

Pembinaan disiplin ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	40.000.000,00	Pembinaan disiplin ASN	Kab Tebo	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	47.400.000,00	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar	100%	338.169.200,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar	100%	64.876.578,00	
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial	30,7%				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial	30,7%		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				338.169.200,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				64.876.578,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	338.169.200,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab Tebo	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	64.876.578,00	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sub kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada rancangan awal RKPD hampir semua tidak sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi anggaran sehingga hampir semua pagu yang ada pada rancangan awal RKPD dikurangi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2026 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2026 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tebo Tahun 2026, perlu dilakukan telaahan terhadap arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat pusat. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian sasaran strategis nasional, serta memperkuat keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah. Secara umum, kebijakan nasional yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut, salah satu pilar utama pembangunan adalah *transformasi sumber daya manusia*, dengan fokus pada peningkatan kualitas ASN melalui sistem merit, pembelajaran sepanjang hayat, dan digitalisasi birokrasi.
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yang menjadi dokumen tahunan pembangunan nasional, memuat prioritas nasional serta arah kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral dan tematik. Berdasarkan arahan sementara, RKP 2026 diperkirakan masih mengedepankan agenda reformasi birokrasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
3. Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu terwujudnya

birokrasi berkelas dunia yang adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kepegawaian daerah, kebijakan ini mendorong pelaksanaan sistem merit yang kuat, transformasi manajemen talenta ASN, serta peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

4. Kebijakan Nasional Pengelolaan ASN, termasuk arah kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB, menekankan pada penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan ASN, digitalisasi layanan kepegawaian, penguatan manajemen kinerja, dan peningkatan kualitas rekrutmen serta pelatihan ASN.

Berdasarkan berbagai kebijakan nasional tersebut, BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk:

1. Mengembangkan kapasitas dan profesionalisme ASN
2. Meningkatkan tata kelola manajemen ASN yang berbasis sistem merit;
3. Mendorong optimalisasi kinerja pegawai
4. Menyusun perencanaan kebutuhan ASN yang selaras dengan Anjab-ABK dan peta jabatan yang valid;
5. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Dengan demikian, kebijakan nasional menjadi pijakan strategis dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta mendukung visi Kabupaten Tebo dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian daerah untuk mendukung Misi ke 5 Kabupaten Tebo periode 2025 – 2029 yaitu : **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.**

Tujuan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah **meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih**, dengan sasaran yang sesuai adalah **Tata pemerintahan yang semakin akuntabel, melayani dan berintegritas berbasis transformasi digital.**

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2026 merupakan implementasi dari upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tebo.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indek profesionalitas ASN	76,83
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penataan ASN	Indek Sistem Merit	0.53
		Meningkatnya kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	26,59

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM Kabupaten Tebo.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2026 antara lain :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
1. Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian a. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Mutasi dan Promosi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Mutasi ASN b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat c. Pengelolaan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur b. Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai c. Pembinaan Disiplin ASN

<p>2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, kompetensi, Manajerial dan Fungsional</p> <p>a. Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan</p>
--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.473.238.897,00				7.531.612.283,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.473.238.897,00				7.531.612.283,00
	5.03	KEPEGAWAIAN			4.408.362.319,00				7.081.612.283,00
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</i>	83.77	3.537.028.286,00			83.79	4.882.259.571,00
		[Meningkatkan kinerja instansi pemerintah]	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	83.77	3.537.028.286,00			83.79	4.882.259.571,00
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	14.000.000,00			4 Dokumen	25.000.000,00
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Dokumen 35 orang	2.902.193.186,00			12 Dokumen 35 orang	4.008.195.871,00
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	2.766.089.186,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35 Orang/bulan	3.872.091.871,00
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	136.104.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	136.104.000,00
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	22.800.000,00			2 Laporan	22.800.000,00
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	22.800.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	22.800.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	35.000.000,00			5 orang	53.000.000,00
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	5 Orang	35.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	53.000.000,00
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Dokumen 12 Laporan 10 Paket 5 Paket 2 Paket	199.345.400,00			3 Dokumen 12 Laporan 10 Paket 5 Paket 2 Paket	348.408.800,00
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	6.996.900,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	7.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	62.997.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	116.411.000,00
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	29.356.500,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	50.000.000,00
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	24.995.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	24.997.800,00
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan 4 Laporan	229.258.800,00			12 Laporan 4 Laporan	212.814.900,00
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	120.168.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	100.000.500,00
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	109.090,800	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	109.814.400,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	19 Unit 46 unit	133.930.900,00			19 Unit 46 unit	212.040.000,00
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	19 Unit	101.890.900,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Unit	180.000.000,00
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	46 Unit	32.040.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	46 Unit	32.040.000,00
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik</i>	2.07 % 83 % 90.1 %	871.334.033,00			2.07 % 83 % 90.1 %	2.199.352.712,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		[Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN]	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	2.07	871.334.033,00	-	-	2.07	2.199.352.712,00
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	83				83	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	90.1				90.1	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Jumlah Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian Jumlah laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Lembaga	391.504.100,00			4 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Lembaga	603.000.000,00
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	87.700.000	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	340.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	100.000.000,00
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							
			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>	1 Lembaga	23.824.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	45.000.000,00
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen	249.980.100,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	118.000.000,00
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	4 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen	253.486.133,00			4 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen	1.210.209.486,00
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>	4 Dokumen	20.098.600,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	461.209.486,00
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	6 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	6 Dokumen	99.000.000,00
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>	1 Dokumen	210.387.533,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	650.000.000,00
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 orang 50 orang	143.601.600,00			10 orang 50 orang	246.143.226,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							
			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	50 Orang	126.523.200,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	196.143.226,00
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>	10 orang	17.078.400,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 orang	50.000.000,00
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	35 orang 9 orang 1 dokumen	82.742.200,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 orang 9 orang 1 dokumen	140.000.000,00
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1 dokumen	20.000.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	40.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai							
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>	35 Orang	15.342.200,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 orang	50.000.000,00
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN							
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>	9 Orang	47.400.000,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Orang	50.000.000,00
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			64.876.578,00				450.000.000,00
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar</i>	100 %				100 %	
			<i>Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial</i>	30,7%	64.876.578,00			30,8%	450.000.000,00
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	1 Laporan	64.876.578,00			1 Laporan	450.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	1 laporan	64.876.578,00	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	450.000.000,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS/APBD Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan terutama berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026-2029.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang mengingat waktu serta pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.
2. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2026, menjadi dasar bagi

penyusunan RKA/DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Tahun 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2026. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2025-2029.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2026 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2026, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo juga berfungsi

sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Muara Tebo, - 11 - 2025

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



SUWARTO, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680806 199803 1 003